

ANALISIS KETERKAITAN PUSAT INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU DAN WILAYAH PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT (TR) DI SULAWASI SELATAN

*Linkage Analysis Between the Center of Wood Processing Industry and Regional
Development of Community Plantation Forest*

Muh. Nurdin Abdullah

Abstract

This research was proposed to analyze the linkage between the center of wood processing industry and the development of the community plantation forest (Hutan Tanaman Rakyat - HTR). The data collection were carried out by survey and documentation method. The data were used to describe the regional analysis. The result shows that there were six centers of wood processing industries: Makassar, Pare-Pare, Palopo, Tana Toraja, Watampone, and Bulukumba. The centers of the wood processing in Makassar and Palopo served the demand both for exporting activities to the outside provinces (export and domestic consumption) and inside the province. In addition, the center of wood processing also became the centers for serving the demand of the wood inputs as intermediate demand. In order to create the agglomeration of HTR, the centers of wood processing should become the centers for the development of the HTR.

Keywords: Wood processing industry, community plantation forest, South Sulawesi

PENDAHULUAN

Departemen Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan menetapkan agenda baru terkait dengan kebijakan revitalisasi sektor kehutanan yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat melalui :

- (1) pemberian akses yang lebih luas terhadap pemamfaatan hutan produksi
- (2) akses ke lembaga pembiayaan pembangunan kehutanan dan
- (3) dan akses ke pemasaran hasil hutan (industri perkayuan)

Dengan demikian selain dapat diwujudkan agenda pengurangan kemiskinan, pada saat yang bersamaan juga akan terwujud pengurangan pengangguran dan peningkatan kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta memenuhi permintaan bahan baku industri perkayuan.

Dalam rangka mensukseskan agenda baru tersebut, pemerintah mencanangkan program pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dalam jangka panjang secara konsisten, komprehensif, kordinatif dan kredibel akan membentuk struktur baru perekonomian nasional berdaya saing tinggi yang berbasis sumberdaya alam terbaharui, keunggulan lokal dan tahan terhadap perubahan eksternal seperti krisis moneter/ekonomi.

Program pembangunan Hutan Tanaman Rakyat dilaksanakan dengan 3 pola yaitu pola mandiri, pola kemitraan dengan HTI/BUMN/S dan pola Developer HTR. Dalam pambangunan HTR keberlanjutannya sangat ditentukan oleh kemampuan industri kayu memasok kayu dari kegiatan HTR dengan harga yang menguntungkan petani. Kemampuan industri untuk membeli harga yang tinggi kepada petani sangat ditentukan oleh letak industri kayu dengan bahan

baku (kayu log)., kapasitas produksi dan jenis produk yang dihasilkan. Untuk maksud tersebut analisis struktur industri sangat diperlukan guna menunjang pembangunan HTR. Penelitian bertujuan untuk mempelajari keterkaitan antara pusat industri pengolahan kayu dan pembangunan HTR. Hasil yang diperoleh diharapkan sebagai dasar penetapan wilayah pengembangan HTR.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Oktober sampai Nopember 2007. Pengumpulan data dengan metode wawancara wawancara dengan Instansi (petugas) yang menangani industri kehutanan dan pengusaha industri kayu. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan studi dokumentasi dari laporan penelitian dan data statistik kehutanan. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis secara diskriptif kualitatif sesuai tujuan penelitian. Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis wilayah pasar yang bertujuan untuk menentukan pusat-pusat wilayah aglomerasi usaha kehutanan. Indikatornya adalah keterkaitan ekonomi antar lokasi HTR dengan pusat industri pengolahan kayu.

Analisis wilayah pasar difokuskan pada identifikasi lokasi-lokasi industri pengolahan kayu yang ada pada suatu kabupaten dan kabupaten-kabupaten yang menjadi wilayah *hinterlandnya*. Dengan mempertimbangkan wilayah pasar pengadaan bahan baku kayu.

Untuk keperluan analisis lokasi tersebut, dilakukan diskusi dengan industri *wood working* antara lain dengan: PT Katingan Timber di Makassar, PT Panply di Kabupaten Luwu, serta industri pengergajian yang ada di setiap kabupaten/kota

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Struktur Industri Hasil Hutan Kayu

Analisis struktur industri hasil hutan kayu bertujuan untuk menggambarkan struktur bahan baku sekaligus menggambarkan permintaan (*demand*) bahan baku industri hasil hutan kayu Sulawesi Selatan. Struktur industri hasil hutan kayu Sulawesi Selatan disajikan pada Tabel 4.

Struktur industri pengolahan kayu Sulawesi Selatan didominasi oleh industri kayu hulu dengan kapasitas izin sebesar 532.440 m³/tahun atau sebesar 69,0% dari kapasitas izin industri hasil hutan kayu Sulawesi Selatan. Sedangkan kapasitas izin industri pengolahan kayu hilir adalah sebesar 240.115 m³/tahun atau sebesar 31,0% dari total kapasitas izin industri pengolahan hasil hutan kayu Sulawesi Selatan sebesar 772.555 m³/tahun. Struktur industri tersebut menggambarkan permintaan bahan baku kayu bulat industri yang relatif tinggi dibanding potensi hasil hutan kayu Sulawesi Selatan yang saat ini didominasi dari produksi kayu dari hutan rakyat.

Tabel 4. Struktur Industri Hasil Hutan Kayu Sulawesi Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Produk	Jumlah Industri	Kapasitas Izin Industri (m ³ /th)	
				Hulu	Hilir
1.	Makassar	Plywood	1	72.000	-
		Penggergajian	21	154690	-
		Wood Working, dll	42	-	153.567
2.	Luwu	Plywood	2	122.810	-
		Penggergajian	5	13.500	-
		Wood Working, dll	4	-	76.354
3.	Luwu Utara	Penggergajian	37	72.420	-
		Moulding	1	-	5.000
4.	Gowa	Penggergajian	3	4.900	-
		Wood Working, dll	4	-	1.000
5.	Enrekang	Penggergajian	2	1.950	-
6.	Pare-Pare	Penggergajian	1	2.880	-
		Flooring	1	-	2.000
7.	Bone	Penggergajian	3	2.000	-
8.	Maros	Penggergajian	2	6.500	-
		Flooring	1	-	850
		Mebel	-	-	144
9.	Selayar	Penggergajian	1	450	-
10.	Bantaeng	Moulding	1	-	1.200
11.	Takalar	Penggergajian	1	1.250	-
12.	Sinjai	Penggergajian	1	730	-
13.	Barru	Penggergajian	1	360	-
14.	Tator	Veneer	1	-	40.000
15.	Bulukumba	Veneer	1	-	30.000
16.	Sidrap	Veneer	1	-	6.000
Jumlah			138	532.440	240.115

Sumber: Statistik Kehutanan, 2005

Data pada Tabel 4 menunjukkan kabupaten/kota yang merupakan pusat-pusat industri pengolahan hasil hutan kayu Sulawesi Selatan yang ditunjukkan oleh kapasitas industri kabupaten/kota yang relatif besar terhadap total kapasitas industri pengolahan hasil hutan kayu Sulawesi Selatan yaitu:

a. Kota Makassar dengan kapasitas industri pengolahan kayu hulu sebesar 226.690 m³/tahun (42,6%) dan kapasitas industri pengolahan kayu hilir sebesar 153.567 m³/tahun (64,0%). Kapasitas total industri pengolahan hasil hutan kayu Kota Makassar adalah sebesar 380.257 atau sebesar 49,2% dari total kapasitas industri

pengolahan hasil hutan kayu Sulawesi Selatan.

b. Kabupaten Luwu dengan kapasitas industri pengolahan kayu hulu sebesar 72.420 m³/tahun (25,6%) dan kapasitas industri pengolahan kayu hilir sebesar 76.354 m³/tahun (31,8%). Kapasitas total industri pengolahan hasil hutan kayu Kabupaten Luwu adalah sebesar 148.774 atau sebesar 19,2% dari total kapasitas industri pengolahan hasil hutan kayu Sulawesi Selatan.

c. Kabupaten Luwu Utara dengan kapasitas industri pengolahan kayu hulu sebesar 136.310 m³/tahun (13,6%) dan kapasitas industri pengolahan kayu hilir sebesar 5.000 m³/tahun (2,1%). Kapasitas total industri

- pengolahan hasil hutan kayu Kabupaten Luwu Utara adalah sebesar 141.310 atau sebesar 18,3% dari total kapasitas industri pengolahan hasil hutan kayu Sulawesi Selatan.
- d. Kabupaten Tator dengan kapasitas industri pengolahan kayu hilir sebesar 40.000 m³/tahun (16,6%). Kapasitas total industri pengolahan hasil hutan kayu Kabupaten Tator adalah sebesar 5,2% dari total kapasitas industri pengolahan hasil hutan kayu Sulawesi Selatan.
 - e. Kabupaten Bulukumba dengan kapasitas industri pengolahan kayu hilir sebesar 30.000 m³/tahun (12,5%). Kapasitas total industri pengolahan hasil hutan kayu Kabupaten Bulukumba adalah sebesar 3,9% dari total kapasitas industri pengolahan hasil hutan kayu Sulawesi Selatan.

Struktur Pasar Bahan Baku Industri

Analisis struktur pasar bahan baku industri hasil hutan kayu bertujuan untuk menggambarkan sistem pengadaan bahan baku dan *efektifness* industri hasil hutan kayu Sulawesi Selatan.

Sistem Pengadaan Bahan Baku

Bahan baku berupa kayu bulat (log) industri hasil hutan kayu Sulawesi Selatan diklasifikasi menjadi tiga kelompok jenis yaitu, (1) kelompok jenis kayu meranti, (2) kelompok jenis kayu rimba campuran, dan (3) kelompok jenis

kayu indah. Kelompok jenis meranti terdiri atas jenis-jenis kayu kapur, keruing, limpas, meranti, mersawa, nyatoh, palapi, dan resak. Kelompok jenis ini digunakan sebagai bahan baku *face* dan *back veneer plywood*. Kelompok jenis kayu rimba campuran terdiri atas jenis-jenis sengon, bintangur, bakata, binuang, bunga, terentang, jambu-jambu, kempas, ketapang, langori, lita-lita, palado, pisang-pisang, medang, sama-sama, suren, kalantas, talise, tapi-tapi, tarra, tea, tipulu, dan asam-asam. Produk kayu IPKTM seperti jenis-jenis kayu mangga, kemiri, durian, sengon, gmelina, dan kapuk juga termasuk kelompok jenis kayu rimba campuran. Kelompok jenis rimba campuran ini umumnya digunakan sebagai *core veneer plywood*. Kelompok jenis kayu indah yang digunakan sebagai *face veneer plywood* adalah jenis dahu dan cempaka. Struktur penggunaan bahan baku industri kayu hulu Sulawesi Selatan terdiri atas kelompok kayu meranti sebesar 75%, rimba campuran sebesar 24%, dan kayu indah sebesar 1% (Makkarennu, 2006).

Sistem pengadaan bahan baku kayu bulat oleh industri kayu Sulawesi Selatan ada dua yaitu, sistem pembelian kayu bulat dari IUPHHK milik industri, dan pembelian bebas dari IUPHHK bukan milik industri dan pembelian bebas dari produk IPKTM. Keadaan pengadaan bahan baku kayu bulat oleh industri hasil hutan kayu Sulawesi Selatan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Sistem Pengadaan Bahan Baku Industri Hasil Hutan Kayu Sulawesi Selatan, tahun 2004.

No	Kabupaten/ Kota	Sistem Pengadaan Bahan Baku dari IUPHHK Milik Sendiri		Sistem Pengadaan Bahan Baku dari Pembelian Bebas		Asal Bahan Baku	Jenis Kayu Dominan
		Target (m ³)	Realisasi (m ³)	Target (m ³)	Realisasi (m ³)		
1.	Makassar	5913,1	2201,56	52565,86	25393,14	Mamuju, Palu, Sul-Sel, Tiwan	Meranti, R. Camp
2.	Gowa	0	0	1292,13	102,25	Sul-Sel	Jati
3.	Takalar	0	0	82,59	82,59	Sul-Sel	Jati
4.	Bulukumba	12825,26	0	0	0	Sul-Sel	R.Camp
5.	Sinjai	961,9	961,9	0	0	Sul-Sel	Jati
6.	Bone	19700,26	3163,46	53940,58	25577,98	Sul-Sel	Jati
7.	Soppeng	-	-	-	-	-	-
8.	Luwu	-	-	-	-	-	-
9.	Luwu Utara	19700,26	0	0	0	Sul-Sel	R.Camp
10.	Luwu Timur	8000	0	28582,39	2147,26	Sul-Sel, Sultra	R.Camp
11.	Enrekang	27700,26	0	28582,39	2147,26	Sul-Sel	Jati
12.	Pare-Pare	55400,52	0	57164,78	4294,52	Sul-Sel	Jati
13.	Maros	110801	0	114329,6	8589,04	Sul-Sel	Jati
14.	Barro	201901,8	0	228659,1	17178,08	Sul-Sel	Jati
15.	Tator	-	-	-	-	-	-
Jumlah		462.904,4	6.326,92	565.199,4	85.512,12		

Sumber: Data dan Informasi (Statistik) Kehutanan Tahun 2005

Data pada Tabel 5 menunjukkan target pengadaan bahan baku industri hasil hutan kayu Sulawesi Selatan pada tahun 2004 sebesar 1.028.103,8 m³ terdiri atas target bahan baku dari IUPHHK milik sendiri sebesar 462.904,44 m³ (45,0%) dan target bahan baku dari pembelian bebas sebesar 565.199,4 m³. Realisasi target pengadaan bahan baku tersebut relatif kecil yaitu hanya sebesar 91.839,04 m³ atau sebesar 8,9%. Realisasi pengadaan bahan baku tersebut didominasi dari sistem pembelian

bebas dengan realisasi sebesar 15,1%, sedangkan realisasi pengadaan bahan baku dari IUPHHK milik sendiri hanya sebesar 1,4%. Hal ini menunjukkan kondisi pengadaan bahan baku industri hasil hutan kayu yang memiliki *efektifenes* yang sangat rendah.

Jenis kayu untuk bahan baku industri hasil hutan kayu Sulawesi Selatan didominasi jenis rimba campuran dan jenis kayu jati. Jenis rimba campuran banyak mensuplay industri kayu plywood, sedangkan jenis kayu jati banyak mensuplay

industri penggergajian. Jenis kayu rimba campuran disuplay dari Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan, sedangkan jenis kayu jati disuplay dari kabupaten-kabupaten dimana industri penggergajian tersebut berada dan dari kabupaten di sekitarnya.

Effectiveness Industri Hasil Hutan Kayu

Target pemenuhan bahan baku IPKH Sulawesi Selatan pada tahun 2004 adalah sebesar 241.231,75 sedangkan realisasinya hanya sebesar 62.561,85 atau hanya sebesar 25,9%. Hal ini berarti bahwa *Effectiveness* IPKH Sulawesi Selatan pada tahun 2004 sangat rendah yakni sebesar 11,8%. *Effectiveness* IPKH sebesar 11,8%, secara ekonomi tidak menguntungkan IPKH, sehingga perlu dukungan peningkatan jumlah

bahan baku untuk meningkatkan *Effectiveness* IPKH.

Produksi kayu IPKTM memberikan kontribusi yang nyata terhadap supply bahan baku kayu bulat IPKH Sulawesi Selatan selama lima tahun terakhir. Hasil penelitian Supratman, dkk (2004) menyimpulkan kontribusi kayu IPKTM meningkat dari sebesar 1,8% pada tahun 2000 menjadi sebesar 54,2% pada tahun 2004. Hal ini seiring dengan tidak aktifnya HPH sebagai pemasok kayu bulat utama IPKH. Pada sisi yang lain, potensi tebangan tahunan lestari dari IPKTM Sulawesi Selatan adalah sebesar 8.133 m³/tahun sampai dengan 12.953 m³/tahun, jauh lebih kecil dibanding realisasi produksi kayu IPKTM Sulawesi Selatan rata-rata sebesar 30.284,2 m³/tahun. Kondisi ini menunjukkan kecenderungan potensi IPKTM akan habis apabila tidak dilakukan upaya-upaya pengelolaan hutan rakyat secara berkelanjutan serta tidak ada upaya untuk mengembangkan hutan rakyat.

Keterkaitan Pusat Industri Pengolahan Kayu Dan Wilayah Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat

Pengusahaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang teraglomerasi akan menyebabkan penurunan total biaya rata-rata termasuk biaya transport (*transport cost*) dari usaha HTR tersebut, sehingga akan menguntungkan bagi individu dan kelompok masyarakat sebagai pengusaha HTR. Hal ini dapat terjadi jika lokasi HTR berdekatan dengan industri pengolahan kayu atau pasar komoditi kayu serta didukung oleh sistim transportasi dan pelayanan publik. Sebaliknya pengusahaan HTR yang terdeglomerasi akan menyebabkan terjadinya kenaikan total biaya rata-rata, ini dapat disebabkan karena lokasi industri pengolahan kayu/ pasar yang jauh serta sistim transportasi dan

pelayanan publik yang tidak mendukung.

Agglomerasi usaha HTR juga dapat terjadi karena berkembangnya usaha hutan rakyat dan usaha produksi kayu yang lain, hal ini disebabkan karena adanya skala ekonomis dalam pengadaan bahan baku kayu. Oleh karena itu penempatan lokasi usaha HTR dan industri pengolahan kayu sangat menentukan keberlanjutan usaha HTR. Untuk maksud tersebut akan dibahas tentang kondisi dan permasalahan industri pengolahan kayu saat ini serta pengembangan industri pengolahan kayu yang mendukung berkembangnya HTR.

Kondisi dan permasalahan Industri Kayu Lapis Sulawesi Selatan

Di Sulawesi Selatan terdapat 2 (dua) buah industri kayu lapis, yaitu PT. Katingan Timber Celebes yang berlokasi di Makassar dan PT. Panca Usaha Palopo Plywood yang

berlokasi di Desa Bua Kabupaten Luwu. Kedua industri kayu lapis tersebut mengalami permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku kayu, sebagai akibat menurunnya produksi kayu bulat di Sulawesi Selatan dan tingginya biaya transport bahan baku, karena bahan baku kayu diperoleh dari

Syarat utama kesinambungan produksi industri kayu lapis adalah tersedianya bahan baku kayu secara kontinyu sesuai kebutuhan dan biaya perolehan bahan baku yang relatif murah. Hasil penelitian Makkarennu (2006) kebutuhan bahan baku kayu lapis di Sulawesi Selatan selama kurun waktu 1996-2005 rata-rata sebesar 256.779,66 m³/ tahun. Sedangkan rata-rata perproduksi kayu bulat per tahun di Sulawesi Selatan dari hutan alam sebesar 116.779,82 m³ atau hanya mampu memenuhi kebutuhan bahan baku industri industri kayu lapis di Sulawesi Selatan hanya sebesar 55%.

Untuk memenuhi kebutuhan baku kayu lapis tersebut di Sulawesi Selatan, PT. Katingan Timber Celebes memperoleh bahan baku dari provinsi lain, yaitu dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Maluku. Sementara untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu pada industri kayu lapis PT. Panca Usaha Palopo Plywood sejak 3 tahun terakhir mereka memperolehnya dari Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara. Mencermati lokasi perolehan baku kayu industri kayu lapis dapat dikemukakan bahwa terjadi biaya perolehan bahan baku yang tinggi (terjadi deglomersi industri kayu lapis).

PT. Panca Usaha Palopo Plywood dalam mengatasi kelangkaan bahan baku dan biaya perolehan bahan baku, mereka melakukan pembelian kayu rakyat seperti jenis mangga, kemiri, durian, gemelina, kapok, sengon dan lain-lain melalui anak perusahaannya,

lokasi yang jauh (provinsi lain). Hal ini menyebabkan terjadi deglomerasi yaitu kenaikan biaya rata-rata pada usaha industri kayu lapis. Kalau kenaikan biaya ini tidak diimbangi dengan kenaikan harga kayu lapis, maka lambat laun usaha kayu lapis mengalami kerugian.

yaitu PT. PAL (Palopo Alam Lestari) telah mendirikan industri veneer di Kabupaten Bulukumba dengan kapasitas produksi terpasang tahap awal 6.000 m³ dan telah ditingkatkan menjadi 30.000 m³. Bahan baku industri veneer tersebut disuply dari produksi kayu rakyat Kabupaten Sinjai, Bulukumba, Bantaeng dan Kabupaten Jennepono. PT. PAL itu juga telah membangun industri veneer di Kabupaten Sidrap yang diharapkan dapat menampung produksi kayu rakyat dari kabupaten Sidrap, Pinrang, Enrekang bagian Selatan, Barru dan Soppeng bagian Barat dengan kapasitas produksi pada tahap awal 6.000 m³/tahun. PT. PAL juga merencanakan membangun industri veneer di Kabupaten Bone untuk menampung produksi kayu dari Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng bagian Timur dan Kabupaten Maros bagian Timur. PT. Panca Usaha Palopo plywood juga telah mendirikan industri veneer di Kabupaten Tana Toraja melalui anak perusahaan PT. NJP (Nely Jeni Pratama) untuk menampung produksi kayu pinus dari hutan rakyat dari Kabupten Tator. Tambahan suplai bahan baku kayu dari hutan rakyat saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri kayu lapis di Sulawesi Selatan.

Industri Pengolahan Kayu lain (Kayu gergajian, moulding dan Wood Working)

Industri pengolahan kayu gergajian, moulding dan wood working juga mengalami keterbatasan perolehan bahan baku kayu. Secara nasional

kapasitas terpasang kayu jauh melampaui kemampuan pasokan bahan baku berupa kayu bulat. Kondisi kekurangan bahan baku di Sulawesi Selatan berdasarkan data statistik, produksi kayu bulat dari HPH dan izin sah lainnya terus menurun dari tahun ke tahun. Industri pengolahan kayu, khususnya industri kayu gergajian tidak mampu memproduksi sesuai kapasitas terpasangnya akibat kesulitan bahan baku. Data statistik Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2005 menunjukkan bahwa terdapat 348 buah industri pengolahan kayu termasuk 2 buah industri kayu lapis. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tersebut diperoleh dari provinsi lain seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua.

Industri kayu gergajian, moulding dan wood working tersebar pada setiap kabupaten. Pendirian industri kayu olahan tersebut lokasi industrinya (pabriknya) berorientasi pada lokasi bahan baku terutama industri pengolahan kayu gergajian kayu dan industri moulding. Sedangkan industri wood working cenderung berorientasi pasar (berlokasi di ibukota kabupaten dan provinsi). Penempatan industri pengolahan kayu gergajian, wood working dan moulding oleh pengusaha kayu olahan tersebut cenderung didasarkan atas ketersediaan bahan baku, biaya perolehan bahan baku, biaya pemasaran dan biaya tenaga kerja. Lokasi industri pengolahan kayu ini dapat berpindah sesuai tuntutan aglomerasi, berbeda halnya pada industri kayu lapis sangat susah dipindahkan karena terkait dengan besarnya biaya investasi dan skala usaha yang tinggi.

Aglomerasi Usaha HTR

Pengembangan HTR harus terkait dengan industri pengolahan kayu, hal ini berdampak kepada peningkatan pendapatan usaha HTR dan kesinambungan usaha industri kayu. Keterkaitan yang tinggi antara usaha HTR dan industri pengolahan kayu (terjadi aglomerasi) akan mendorong meningkatnya jumlah lapangan usaha dan kesempatan kerja yang pada gilirannya akan mendorong berkembangnya perekonomian wilayah kabupaten/kota dan provinsi serta perekonomian nasional. Untuk mendorong terciptanya aglomerasi HTR perlu merancang penempatan industri pengolahan kayu dan lokasi usaha HTR. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penempatan industri pengolahan kayu yang mendorong terjadinya aglomerasi HTR adalah sebagai berikut:

- a. Potensi produksi kayu/suplai bahan baku kayu seperti potensi kayu dari hutan alam, hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan.
- b. Potensi lahan pengembangan HTR.
- c. Kedekatan lokasi dan sarana prasarana sosial ekonomi lainnya.
- d. Ketersediaan industri (telah ada industri)
- e. Ketersediaan pelayanan publik kehutanan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka penempatan lokasi industri pengolahan kayu dan areal HTR di Sulawesi Selatan dibagi atas beberapa pusat industri pengolahan kayu dan wilayah pengembangan HTR. Keterkaitan antara pusat pengembangan industri kayu dengan wilayah pengembangan bahan baku kayu dapat saling mendukung yang diharapkan menciptakan aglomerasi usaha kehutanan, khususnya dalam pengembangan HTR.

Pusat Industri Pengolahan Kayu Makassar dan sekitarnya

Pusat industri pengolahan kayu Makassar ini diharapkan dapat memasok/membeli produksi kayu HTR yang berasal dari Kabupaten Gowa, Takalar, Maros dan Pangkep. Pada pusat industri kayu Makassar terdapat industri kayu lapis (PT. Katingan Timber Celebes) yang diharapkan memanfaatkan produk kayu dari usaha HTR terutama yang berdaur pendek (8 tahun) seperti gemelina, kemiri, sengon dan kapuk. Namun sampai saat ini PT. Katingan Timber Celebes belum memanfaatkan kayu rakyat. Bahan baku selama ini hanya diperoleh dari produksi kayu dari hutan alam. Pengembangan industri ini kedepan diharapkan dapat membangun industri veneer untuk memanfaatkan produksi HTR dan hutan rakyat yang berasal dari kabupaten-kabupaten tersebut diatas.

Khusus industri gergajian, wood working dan moulding telah tersedia di Makassar dan Maros memperoleh bahan baku yang berasal dari semua kabupaten di Sulawesi Selatan bahkan dari luar provinsi Sulawesi Selatan. Untuk pengembangan industri ini terkendala ketersediaan bahan baku kayu. Untuk itu penyediaan bahan baku kedepan dapat dikembangkan tanaman jati, sengon dan mahoni pada areal HTR.

Pusat Industri Pengolahan Kayu Pare-Pare dan sekitarnya

Pusat industri pengolahan kayu ini diharapkan melayani pembelian bahan baku kayu yang diproduksi dari kayu rakyat dan HTR yang berasal dari Kabupaten Barru, Sidrap, Enrekang, Soppeng bagian Barat, Enrekang bagian Selatan, Pinrang dan Kota Pare-Pare. Industri pengolahan kayu di Pare-pare dan Barru telah berkembang industri penggergajian, wood working dan moulding khususnya kayu jati. Suplai bahan baku khususnya kayu jati diperoleh dari hutan jati rakyat dari Kabupaten Barru, kota Pare-Pare,

Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Wajo. Sedangkan untuk industri kayu lapis/veneer belum berkembang, walaupun saat ini telah dibangun industri veneer di Kabupaten Sidrap. Diharapkan industri veneer ini dapat membeli/menampung produksi kayu HTR dan kayu hutan rakyat dari wilayah kabupaten tersebut di atas.

Untuk mendukung pengembangan industri kayu gergajian, moulding dan wood working di kota Pare-Pare dan sekitarnya diharapkan jenis tanaman yang dikembangkan pada areal HTR adalah jati dan mahoni. Sedangkan untuk mendukung industri veneer di Kabupaten Sidrap perlu mengembangkan jenis cepat tumbuh (*fast growing*) seperti gemelina, sengon dan kapok.

Pusat Industri Pengolahan Kayu Tana Toraja

Pusat industri pengolahan kayu Tana Toraja diharapkan dapat melayani pembelian produksi kayu HTR, hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan (HKM) yang berasal dari kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang bagian Utara. Pada pusat industri ini yang sangat menonjol industri kayunya adalah jenis industri kerajinan kayu dan industri veneer kayu pinus.

Untuk mendukung pengembangan industri kerajinan kayu di wilayah ini diharapkan dikembangkan tanaman pohon yang digunakan untuk usaha kerajinan kayu seperti tanaman pohon uru. Sedangkan untuk mendukung industri veneer, maka usaha HTR harus dikembangkan tanaman pinus.

Pusat Industri pengolahan Kayu Palopo dan sekitarnya

Pusat industri pengolahan kayu Palopo diharapkan dapat melayani pembelian produksi kayu yang berasal dari HTR dan hutan rakyat yang berasal dari Kabupaten Luwu,

Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur. Di wilayah ini terdapat industri kayu lapis PT. Panca Usaha Palopo Plywood yang berlokasi di Bua (Kabupaten Luwu) yang mengolah lebih lanjut produksi industri veneer menjadi produksi kayu lapis.

Disamping itu industri tersebut diharapkan dapat menampung/membeli produksi kayu dari HTR dan produksi hutan rakyat yang berasal dari kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur. Sedangkan industri penggergajian berkembang di masing-masing kabupaten, terutama di Luwu Utara dan Luwu Timur.

Hal ini disebabkan kedua kabupaten tersebut masih memiliki areal hutan alam yang masih mempunyai produksi kayu.

Pusat Pengembangan Industri Kayu Watampone

Pusat pengembangan industri ini diharapkan dapat memasok/membeli produksi kayu dari HTR, hutan rakyat dan HKM yang berasal dari Kabupaten Bone, Kabupaten Maros bagian Timur dan Kabupaten Soppeng bagian Timur.

Industri kayu gergajian, wood working dan moulding telah ada di daerah ini, namun masih terbatas pada bahan baku kayu jati dan saat ini telah menghadapi kendala dalam pengadaan bahan baku kayu jati. Sedangkan untuk industri kayu lapis/veneer belum ada, sementara potensi pengembangan HTR cukup besar, karena di daerah ini terdapat hutan produksi yang cukup luas (kurang lebih 110.000 hutan produksi) disamping itu terdapat areal hutan rakyat seluas 4.220 ha.

Untuk mendorong berkembangnya usaha HTR di

wilayah ini perlu di bangun industri kayu veneer dengan mengembangkan jenis tanaman cepat tumbuh (*fast growing*). Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan industri kayu penggergajian sebagian areal HTR dikembangkan jenis tanaman kayu jati agar usaha hutan rakyat dapat berkesinambungan.

Pusat pengembangan Industri kayu Bulukumba dan Sekitarnya

Pusat industri ini diharapkan dapat melayani pembelian kayu produksi hutan rakyat dan HKM yang bersal dari Kabupaten Sinjai, Bulukumba, Selayar, Bantaeng dan Jeneponto. Industri kayu yang menonjol di daerah ini dalam industri perahu/kapal kayu dan industri veneer.

Pada wilayah ini tidak direkomendasikan dikembangkan HTR mengingat kabupten tersebut tidak tersedia areal hutan produksi yang cukup luas. Untuk itu dalam memenuhi kebutuhan bahan baku industri kayu maka direkomendasikan pengembangan hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan (HKM).

Untuk mendorong berkembangnya industri perahu diusulkan untuk mengembangkan tanaman pohon bitti dan kayu lain yang dimanfaatkan dalam pembuatan perahu. Sedangkan untuk memenuhi permintaan bahan baku kayu industri veneer diharapkan pengembangan jenis tanaman cepat tumbuh (*fast growing*) seperti gemelina, sengan, kapuk, kemiri, durian dan tanaman MPTS lainnya.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil analisis I wilayah pasar bahan baku industri pengolahan ayu, maka kota Makassar, Pare-Pare, Makale (Tator), Palopo, Watampone, dan Bulukumba merupakan pusat industri pengolahan kayu yang merupakan pusat wilayah aglomerasi usaha HTR. Oleh karena itu, pusat industri tersebut akan menjadi pusat-pusat pelayanan wilayah unit pengelolaan HTR untuk melayani pembangunan HTR pada wilayah kabupaten sekitarnya yang menjadi wilayah hinterlandnya.
2. Pusat Industri pengolahan kayu Gergajian Makassar disamping melayani pasar bahan baku untuk kabupaten Maros, Takalar, Pangkep dan Gowa, Juga merupakan pusat industri pengolahan kayu akhir dari industri kayu gergajian dari pusat industri lainnya di Sulawesi selatan.
3. Pusat Industri pengolahan kayu lapis Palopo disamping melayani pembelian bahan baku kayu log dari kabupaten Wajo, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Luwu Juga melayani pusat industri veneer (bahan baku setengah jadi kayu lapis) Bulukumba, Tana Toraja dan Sidrap untuk pembuatan kayu lapis.
4. Permasalahan yang dihadapi untuk masing-masing industri pengolahan adalah terjadinya deglomerasi (kenaikan biaya) dalam kegiatan pengadaan bahan baku kayu, sebagai akibat menurunnya produksi kayu bulat di Sulawesi Selatan dan tingginya biaya transport bahan baku, karena bahan baku kayu diperoleh dari lokasi yang jauh (provinsi lain). Kalau kenaikan biaya ini tidak diimbangi dengan kenaikan harga kayu lapis, maka lambat laun usaha kayu lapis mengalami kerugian.
5. Untuk mendukung berkembangnya usaha sektor kehutan baik pada usaha pembangunan HTR maupun usaha industri pengolahan kayu diperlukan kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi munculnya keterkaitan yang saling menguntungkan antara pemilik industri kayu dan petani hutan tanaman rakyat.. Bentuk fasilitasi yang dapat dilakukan adalah menetapkan pusat pengembangan industri pengolahan kayu sebagai pusat pelayanan wilayah pembangunan HTR berdasarkan pertimbangan aglomerasi usaha HTR. Sedangkan untuk pengembangan jenis tanaman yang akan dikembangkan pada masing- masing lokasi HTR harus disesuaikan kebutuhan baku kayu pusat industri pengolahan kayu masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kehutanan,2007.
Peraturan Menteri Kehutanan
No. 23 Tentang Hutan
Tanaman Rakyat. Jakarta
- Departemen Kehutanan,2007.
Peraturan Menteri Kehutanan
No. 37 Tentang Hutan
Kemasyarakatan. Jakarta
- Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan,
2007. Pengembangan
Wilayah Hutan Tanaman
Rakyat Sulawesi Selatan ,
2007. Makassar
- Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan,
2000. Rencana Makro
Kehutanan Sulawesi Selatan.
Makassar
- Sekretariat Negara,2007. Peraturan
Pemerintah No. 6 Tahun
2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, Serta
pemamfaatan Hutan. Jakarta
- Syamsu Alam, 2006. Menggali Potensi
Sektor Kehutanan di
Sulawesi.Jurnal Hutan dan
Masyarakat 2006 Vol. I, NO.2,
Agustus 2006. Makassar

Diterima 16 November 2007

Nurdin Abdullah

Laboratorium Konservasi Sumber Daya Hutan,
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telp./Fax. 0411-585917 Indonesia